"DONAT PERDAMAIAN" DUKUNG UKRAINA DARI JERMAN

Jakarta, HanTer—Toko roti Jerman menjual "donat perdamaian" untuk mendukung Ukraina dengan cara yang manis, hidangan itu didekorasi seperti bendera nasional Ukraina untuk menggalang dana bagi anak-anak yang terpaksa melarikan diri setelah invasi Rusia.

Di saat aksi Rusia di Ukraina memasuki pekan kedua, toko roti Huck di Frankfurt mulai menjual donat-donat itu, Kamis (3/3).

Dengan *topping* biru dan kuning, donat tersebut dijual satu euro (Rp15.800) per buah dan 100 persen uangnya dikumpulkan serta akan disumbangkan kepada anak-anak Ukraina yang mencari perlindungan di Frankfurt.

"Kami pikir kami harus segera melakukan sesuatu, tidak secara birokratis," kata pemilik toko roti, Tanja Huck, dikutip dari Reuters.

"Kami memutuskan untuk membuat produk tambahan yang tidak mahal, jadi bisa dibeli semua orang sebanyak mungkin untuk dibawa ke kantor," imbuh Huck.

Kampanye ini terlihat sukses, sebanyak 600 buah donat terjual pada Kamis pagi di 10 cabang toko roti dan sudah ada prapemesanan 300 buah untuk Jumat.

"Kemarin, kami hanya mengunggah sedikit di media sosial, langsung ada pesanan pertama dan pukul delapan pagi ini sebagian besar produk di toko cabang sudah terjual," kata Huck.

"Kami tak menyangka ini disambut sangat baik," imbuh dia, demikian Reuters dikutip Jumat.

■ **Antara**

■ Harga Pangan Merangkak Naik

masih terjangkau.

"Sekalipun ada peningkatan harga, kita berharap harganya masih dalam kewajaran dan bisa dibeli sesuai dengan daya beli masyarakat," kata Riza dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, agar harganya terjaga, Riza menyebut bahwa pihaknya berharap dan berusaha agar ketersediaan pangan di Jakarta cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Caranya, lanjut dia, pertama adalah melakukan operasi pasar. Kemudian, dengan bekerjasama dengan Badan Urusan Logistik (Bulog) baik pusat maupun daerah. "Agar DKI Jakarta harga-harga pangannya bisa terjangkau," ujarnya.

Permintaan

Sementara sebelumnya, Gubernur Anies Baswedan mengaitkan fenomena kenaikan harga pangan di Jakarta ini dengan domestik dan internasional. "Kami menyadari bahwa di luar sana ada pergeseran-pergeseran pasokan karena baik efek domestik maupun internasional yang sekarang sedang terjadi," katanya.

Dia mengatakan kegiatan pengamanan pasokan pangan di DKI Jakarta berjalan sepanjang tahun.

Terlebih kata dia, pihaknya memiliki pembagian tugas BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bertanggung jawab untuk mengelola pasokan (supply). Kemudian ada SKPD yang bertanggung jawab di dalam mengelola permintaan (demand).

Lantas kata dia ketika permintaan dan pasokan terkendali, maka harga pangan menjadi terkendali.

Anies Baswedan memastikan kalau pihaknya akan memantau terus dari dekat terkait pasokan pangan agar bisa terus terjamin keberadaannya.

■ **Sammy**

■ 3 Kali Positif Covid-19

terpapar lagi.

Anehnya, terpapar bukan satu kali tapi dua kali. Alhasil, jika kini terpapar lagi berarti kali ketiga dirinya terpapar. Itulah sekilas mengenai sosok penyanyi Maia Estianty yang mengaku kembali positif Covid-19 untuk ketiga kalinya.

Ya, kabar tersebut disampaikan lewat tayangan video yang diunggah di YouTube AlElDulTV. Uniknya, kata Maia, gejala yang ia rasakan berbeda dengan sebelumnya. Kali ini ia merasakan sakit tenggorokan.

Alhasil, ibu tiga anak ini harus menjalani isolasi mandiri bersama asisten rumah tangga (ART) keluarganya yang ternyata ikut tertular Covid-19. "Selama sepekangu kemarin gue masak buat dia, enggak apa-apa, baik soalnya anaknya," cerita Maia, Kamis (3/3/2022).

Maklum, merasa sama-sama sakit, Maia dan sang ART pun kompak memanjakan satu sama lain dengan masakannya masing-masing. Selama sepekan isolasi, Maia memutuskan untuk memasak untuk sang ART karena selama ini sang ART sudah bekerja keras melayani keluarganya.

Dalam video yang diunggah, Maia memasak berbagai hidangan salah satunya adalah hidangan daging sapi dengan saus khas Korea. Selain pandai menyanyi, rupanya Maia juga lihai dalam meracik makanan.

■ **Romi**

■ Khalid Ibnul Walid

menanyakan kepada Al Walid perihal Khalid. "Orang seperti Khalid tidak mengenal Islam? Andaikan ia gunakan kehebatan dan ketangguhannya-yang selama ini ia gunakan untuk yang lain-bersama kaum muslimin tentu akan lebih baik baginya," kata Rasulullah.

Suatu ketika Al Walid mengikuti Rasulullah untuk umrah qadha ke Mekah. Ia bermaksud mencari Khalid namun tak ketemu. Al Walid berkirim surat kepada Khalid yang isinya memberitahukan bahwa Rasulullah pernah bertanya tentang keberadaan Khalid.

Membaca surat adiknya itu Khalid sangat gembira. "Aku harus segera menemui Rasulullah untuk mengutarakan keislamanku," kata Khalid.

Malamnya Khalid bermimpi seperti berada disebuah daerah sempit dan gersang. Kemudian ia pergi ke suatu tempat yang hijau dan luas. "Sungguh ini suatu mimpi yang baik," kata Khalid.

Khalid bertekad ingin menemui Rasulullah. Ia mengajak Shafwan bin Umayyah untuk menemani, namun Shafwan menolak karena tetap pendiriannya tak mau masuk Islam.

Kemudian menemui Ikrimah bin Abu Jahal namun Ikrimah juga menolak. Akhirnaya Khalid mengajak Utsman bin Thalhah ternyata bersedia. Khalid bersama Utsman berangkat ke Madinah menemui Rasulullah. Dalam perjalanan Khalid bertemu Al Walid adiknya mengatakan ingin bertemu Rasulullah,"Cepat lah pergi menemui Rasulullah karena Rasulullah sudah mengetahui kedatanganmu, beliau menunggu kalian," kata Al Walid.

Akhirnya Khalid dan Ustman menemui Rasulullah menyatakan dirinya masuk Islam. "Wahai Rasulullah, aku telah banyak berada pada posisi yang menentang kebenaran maka bermohonlah pada Allah untuk mengampuniku," kata Khalid.

Rasulullah pun berdoa:"Ya Allah ampunkanlah Khalid atas segala perbuatannya yang menghalangi manusia dari jalan-Mu."

Sejak itu Khalid menjadi salah seorang kepercayaan Rasulullah sebagai juru tulis Rasulullah. Selain itu menjadi pimpinan perang diantaranya dalam peperangan membebaskan Mekah dari kaum Quraisy.

Wallohu a'lambishshawab

■ **H Nuchasin M Soleh/ *Harian Terbit***

■ Jaga Kans ke Puncak

klasemen juga berpeluang pada pekan berikutnya. Pertama, tentu mereka wajib lebih dulu menumbangkan Salernitana. Dan yang kedua berharap AC Milan bermain imbang saat menghadapi Napoli, sehari berselang.

Saat ini Inter Milan bercokol di peringkat tiga klasemen dengan mengemas 55 poin dari 26 laga yang telah dilalui. Skuad Inzaghi hanya tertinggal dua poin dari Napoli dan AC Milan yang duduk di pucuk serta peringkat dua dengan mengemas 57 poin dari 27 laga yang telah dilewati.

Inter akan menyodok ke puncak apabila skenario tersebut berhasil terwujud, yakni menumbangkan Salernitana dan berharap Milan vs Napoli bermain imbang. Jika itu terjadi, maka ketiga kesebelasan sama-sama mengoleksi 58 angka. Namun Nerazzurri berhak bercokol di pucuk lantaran unggul dalam produktivitas gol.

Kendati demikian, Inzaghi dipastikan tak ingin berharap lebih oleh klub lain, terutama dua rival seperti Milan dan Napoli. Mereka akan konsentrasi penuh bagaimana mengembalikan jalur kemenangan demi menjaga kans mempertahankan scudetto musim ini.

Di atas kertas, Inter Milan mampu dengan mudah menjinakkan Salernitana. Terlebih pada putaran pertama di markas lawan, Nerazzurri berhasil menggilas tuan rumah dengan skor telak 0-5, pertengahan Desember lalu. Namun, hal tersebut pantang menjadi acuan.

Sebab Salernitana bisa saja menjadi batu sandungan bagi Inter. Klub yang berposisi di dasar klasemen telah membuktikan dengan tak terkalahkan dalam empat pertandingan terakhir, termasuk saat menahan imbang AC Milan 2-2 pada 20 Februari lalu.

Ditambah, Inter juga tengah diselimuti krisis yang tak kunjung menang dalam lima pertandingan terakhir di berbagai ajang, seperti Serie-A, Coppa Italia maupun Liga Champions. Dalam lima pertandingan terakhir, skuad Inzaghi mencatat tiga hasil imbang dan dua kekalahan.

Menyikapi hal tersebut, Milan Skriniar salah satu pemain belakang Inter mengaku, Maret ini menjadi momentum bagi mereka untuk bangkit. Lebih lanjut, perlu berbagai cara untuk mengembalikan tren kemenangan. Terutama saat menjamu Salernitana akhir pekan ini.

"Kami membutuhkan kemenangan untuk kembali ke jalurnya. Kami menantikan pertandingan melawan Salernitana pada akhir pekan ini. Itu tidak akan mudah karena mereka juga akan mencari poin untuk bertahan hidup (di Serie-A red)," jelasnya dikutip Football Italia.

■ **Eka**

■ Periksa dan Adili Cak Imin, Bahlil, Luhut dan Zulhas

mereka tidak dihadang maka bisa saja sukses rencana atau konspirasi jahat tersebut menunda pemilu dan memperpanjang masa jabatan presiden.

"Saya salut sama PDIP, Gerindta, PPP, Nasdem dan partai oposisi yang teguh menjaga konstitusi. Mereka berdiri teguh atas nama konstitusional," tegasnya.

Pasal Berlapis

Sementara itu, peneliti senior dari Institute for Strategic and Development (ISDS), Aminudin mengatakan, jika hukum tidak tebang pilih Luhut Panjaitan dan parpol yang ingin gagalkan pilpres atau pemilu bisa terjerat pasal berlapis.

"Berdasarkan pasal 531 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan menghalangi seseorang untuk memilih, membuat kegaduhan, atau mencoba menggagalkan pemungutan suara dipidana paling lama 4 tahun dan denda maksimal Rp48 juta," ujarnya kepada *Harian Terbit*, Kamis (3/3/2022).

Kemudian Pasal 88 KUHP menyebutkan, "Dikatakan ada pemufakatan jahat, apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Dan masih banyak pasal lain.

Periksa Zulhas

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie M. Massardi mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk segera memeriksa anggota DPR RI, Zulkifli Hasan (Zulhas) yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, terkait kebenaran informasi di masyarakat soal keterlibatan eksekutif dalam wacana penundaan Pemilu 2024.

MKD harus segera melakukan pemeriksaan terhadap Zulhas untuk membuktikan dan menjelaskan kepada publik siapa yang berbohong, Zulhas atau Luhut.

"Nah apabila persekongkolan penundaan pemilu itu dianggap melanggar etika DPR, etika parlemen, karena ini kan jadwalnya sudah disepakati oleh parlemen, berarti ada pengkhianatan di dalam parlemen," kata Adhie.

Menurutnya, apabila Zulhas dinyatakan dipaksa oleh Luhut, harus disampaikan kepada publik.

"Kalau ini dianggap melakukan pengkhianatan terhadap kesepakatan yang sudah disepakati oleh parlemen maka semua yang terlibat di dalam persekongkolan ini harus dibawa ke MKD," jelas Adhie.

Menurutnya, kalau apa yang dikatakan Zulhas itu benar bahwa inisiatif penundaan pemilu dari eksekutif, maka anggota DPR yang lain juga harus ditanya benar tidak soal pernyataan ini bahwa ini memang diinisiasi oleh eksekutif.

"Jika Zulhas yang berbohong, tegas Adhie, harus diberikan sanksi politik. Salah satunya dicopot sebagai anggota DPR RI," papar Adhie.

PKS Geram

Juru bicara DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengkritik keras siasat penundaan Pemilu 2024 yang diduga melibatkan Kabinet Indonesia Maju dan sejumlah ketua umum partai politik.

Menurutnya, jika benar Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan terlibat dalam desain penundaan pemilu, maka sudah melewati batas. Apalagi jika memang ada perintah dari Presiden Jokowi.

"Jika informasi [pertemuan] ini benar, sangat disayangkan sekali. Ini menunjukkan sikap oportunis dan pragmatis, jauh dari sikap negarawan yang berpikir jauh ke depan untuk kemaslahatan bangsa dan negara," ujar Kholid pada CNNIndonesia.com, Rabu (2/3).

"Kalau benar sikap Pak Luhut tersebut adalah perintah Presiden maka ini sudah melewati batas (cross the line)," lanjutnya.

Ia pun menyebut bahwa tindakan politik seperti itu mengancam masa depan demokrasi di Indonesia. "Demokrasi Indonesia akan putar haluan ke era otoritarianisme," papar Kholid.

Sementara itu, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, yakni Jodi Mahardi lantas angkat suara. Dia mengakui bahwa Luhut memang sering bertemu dengan tokoh politik. Namun, ia menampik usulan penundaan Pemilu 2024 didesain oleh Luhut.

Blunder

Pengamat politik Rusmin Effendy mengatakan, usulan perpanjangan jabatan presiden bukan saja blunder, tapi juga melanggar konstitusi UUD 1945. Apalagi jika benar usulan dan skrenario tersebut dari LBP. Skrenario tersebut sengaja dimainkan untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi dan antek-anteknya agar tetap berkuasa. Apalagi dengan mensandera tiga ketua umum parpol, yakni PKB, PAN dan Golkar.

"Mereka sengaja mengulirkan wacana tersebut sebagai barter politik kasus seolah-olah sebagai arus bawah dan situasi darurat yang dijadikan alasan. Semuanya sudah terbaca sejak awal," tandasnya.

Selain itu, lanjut Rusmin, mereka juga mencari legitimasi melalui lembaga survei untuk melegalitas dukungan penundaan pemilu. Padahal sejak terpilih sebagai presiden sampai sekarang, Jokowi sudah gagal. Karena hingga kini tidak ada kebijakan yang pro rakyat sesuai janji kampanye.

"Semuanya tidak terbukti. Karena itu, jika sampai terjadi bisa menimbulkan revolusi rakyat," tegasnya.

Diketahui Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku diundang Luhut khusus membicarakan usulan penundaan pemilu dan pilpres 2024. PAN diminta untuk mendukung dan harus disampaikan ke publik oleh ketua umum dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemenangan Pemilu PAN yang digelar 15 Februari lalu. Luhut mengklaim Presiden Jokowi sudah setuju.

Zulhas lalu kembali dan menceritakan hasil pembicaraan dengan Airlangga kepada pengurus PAN yang masih berada di restoran. Airlangga, kata Zulhas, menegaskan dukungan Golkar atas penundaan Pemilu 2024 dan akan menyampaikan saat kunjungan kerja ke Riau, 24 Februari.

Airlangga juga meminta Zulhas segera bicara terbuka atas nama PAN mendukung penundaan Pemilu 2024. Airlangga pun meyakinkan bahwa Presiden Jokowi telah memerintahkannya untuk mendorong penundaan Pemilu 2024.

■ **Safari**

■ Pengamat: Tiga Parpol Layak Diberi Sanksi

aspirasi masyarakat," ujar Syamsudin kepada *Harian Terbit*, Kamis (3/3/2022).

Perlu Sanksi

Sementara itu, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, sanksi untuk tiga parpol yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden adalah jangan dipilih ketika ada pemilu. Tiga parpol sudah sewajarnya diberi sanksi oleh masyarakat karena sudah mengabaikan amanat reformasi.

"Makanya penolakan lima partai, (pemilu ditunda dan perpanjangan masa jabatan presiden), PDIP, Gerindra, Nasdem, Demokrat, dan PKS, tentu melegakan. Kekuatan lima partai tersebut ditambah DPD akan membuat ciut PKB, PAN dan Golkar," ujar Jamiluddin kepada *Harian Terbit*, Kamis (3/3/2022).

Meski tiga parpol pengusul penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden makin tertekan, sambung Jamiluddin, tapi pihak sponsor akan terus menggalang berbagai elemen masyarakat untuk menyuarakan penundaan pemilu. Suara dari berbagai elemen masyarakat inilah yang akan mereka gunakan untuk menekan MPR agar mengamandemen UUD 1945.

"Mereka ini tentulah para elite negeri yang ingin lebih lama berkuasa. Bagi mereka, menunda pemilu berarti memperlama mengumpulkan pundi-pundi ekonomi," paparnya.

Karena itu, lanjut Jamiluddin, kelompok elite tersebut bersama para oligarki akan terus mengelorakan penundaan pemilu. Pembentukan pendapat umum akan dilakukan secara intensif sampai MPR nantinya tidak punya daya lagi untuk menolaknya. Untuk mencegah hal itu, semua elemen masyarakat yang pro demokrasi dan konstitusi harus bersama-sama menolak penundaan pemilu.

"Elemen masyarakat ini akan menguatkan partai politik dan DPD yang sudah dari awal menolak penundaan pemilu," jelas mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini.

Dibubarkan

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (BaraNusa), relawan pendukung Jokowi, Adi Kurniawan mendukung tiga parpol pengusul penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden dibubarkan. Karena tiga parpol iltu sudah jelas melawan aturan negara. "Kami menolak wacana penundaan pemilu," tegasnya.

Adi menilai parpol-parpol pendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden tidak layak diberi ruang kepercayaan rakyat. Mereka jelas melawan konstitusi dan amanat undang-undang dasar yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu jangan sampai usulan penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi kenyataan.

■ **Safari**

■ PJ Kepala Daerah Harus Miliki Leadership yang Baik

Politics, Peace and Security Studies menggelar Dialog Publik dengan tema: "Pergantian Masa Jabatan Kepala Daerah 2022-2023 Menuju Pemilu 2024; Dinamika Politik, Keamanan dan Efektivitas Pemerintah Daerah".

Implikasi Politik

Dosen Magister Ilmu Politik. FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Prof. Sri Yunanto Ph.D menilai pergantian 272 kepala daerah (2022-2023) akan sarat dengan nuansa politik menyambut Pilpres 2024. Hal ini dikarenakan posisi 272 kepala daerah tersebut sangat strategis terutama posisi kepala daerah yang ada di pulau Jawa.

Menurutnya akhir masa jabatan kepala daerah tersebut akan berimplikasi politik, administratif, ekonomi dan bisnis serta keamanan. Implikasi di bidang poltik akan memunculkan pertanyaan apakah pergantian 272 kepala daerah itu legitimate secara politik.

Hal ini dikarenakan kepala daerah lama dipilih melalui proses pemilu, sedangkan kepala daerah yang baru hanya ditunjuk oleh Kemendagri.

Implikasi di bidang ekonomi dan bisnis, menurut Sri Yunanto, akan memunculkan pertanyaan bagaimana keyikanan para pengusaha dan investor terhadap kepada daerah pengganti.

Implikasi aspek kemanan akan memunculkan pertanyaan apakah pergantian masa jabatan akan mempunyai dampak keamanan seperti akan terjadinya pengerahan masa pendukung yang diganti.

"Untuk menghindari implikasi-implikasi yang mungkin terjadi maka partai politik dan pemerintah harus bersepakat tentang akhir masa jabatan kepala daerah. Selain itu pengganti kepala daerah harus mempunyai legitimasi politik yang tinggi sebagaimana yang digantikan.

Disebutkannya, pengganti kepala daerah juga harus mempunyai leadership capability dan juga harus menjamin bersikap netralitas. Tak hanya itu, parpol, ormas dan pemilik massa harus konsultasi terlebih dahulu dan melakukan deklarasi bersama. "Konsultasilah dulu dengan partai politik, bikin deklarasi bersama sehingga semuanya tenang dan fine-fine saja," tukasnya.

Kekosongan

Kepala Sub Direktorat Wilayah IV, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri, Dr. Saydiman Marto, S.STP, M.Si menegaskan, pemerintah bukan mengganti tapi mengisi kekosongan kepala daerah yang sudah habis masa jabatannya. Disebutkannya, Kepala daerah diganti Pj tidak diperpanjang karena intinya menjalankan UU.

Menurutnya, sesuai UU Nomor 6 Tahun 202, Pj kepala daerah yang ditunjuk mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan, yang dibuktikan dengan riwayat jabatan, menduduki jabatan struktural esselon I dengan pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/C bagi penjabat gubernur dan jabatan struktural esselon II pangkat golongan sekurang-kurangnya IV/B bagi penjabat Bupati/Walikota.

Kemudian daftar Penilaian pelaksanaan pekerjaan selama tiga tahun terakhir sekurangkurangnya mempunyai nilai baik. "Kami sudah mengexercise calon-calon yang akan menjadi Pj. Kemendagri akan mempercayakan ASN-ASN terbaiknya untuk menjadi penjabat kepala daerah," katanya.

Krusial

Anggota DPD, Hj. Fahira Idris, S.E., M.H mengutarakan, persoalan krusial Pemilu serentak 2024 diantaranya, hampir setengah wilayah di Indonesia akan dipimpin kepala daerah yang bukan dipilih langsung oleh rakyat, dan panjangnya durasi yang dijabat para Pj yaitu 1 sampai lebih dari 2 tahun, contoh DKI Jakarta, menghadapi agenda nasional Pemilu dan Pilkada 2024.

Dia meminta, kebijakan mengangkat 272 Pj kepala daerah harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Mekanisme atau aturan main pengangkatannya sesuai UU Pilkada, transparan, akuntabel, melibatkan publik. Pemerintah perlu memastikan bahwa Pj yang ditunjuk mampu melepaskan diri dari kepentingan politik tertentu," ujarnya.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci guna menjaga marwah dan tujuan kehadiran pemimpin daerah yang semestinya dapat bekerja secara profesional dan terbebas dari berbagai kepentingan politik mana pun.

Perlu dipertimbangkan usulan agar sekretaris daerah (sekda) serta merta menjadi Pj kepala daerah.

Pada kesempatan sama, Ketua KPU RI, Ilham Sahputra mengatakan, landasan hukum yang digunakan dalam mengisi kekosongan jabatan kepala daerah adalah UU No 10 Tahun 2016.

Dalam UU tersebut disebutkan, pertama, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024 (Pasal 201 ayat 9).

Kedua, untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 201 ayat 10).

Ketiga, untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 201 ayat 11).

■ ***Harian Terbit*/Sammy**

PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG OBLIGASI BERKELANJUTAN II JASA MARGA TAHAP I TAHUN 2020

PT Bank Mega Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak selaku Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020, Akta No. 25, tanggal 15 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**), dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Obligasi Berkelanjutan II Jasa Marga Tahap I Tahun 2020 (**"Pemegang Obligasi"**) bahwa Wali Amanat akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Obligasi (**"RUPO"**) di Jakarta pada hari **Senin,** tanggal **4 April 2022,** dengan tetap memperhatikan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 dan kebijakan pemerintah lainnya yang terkait.

Sesuai Perjanjian Perwaliamanatan,pemanggilan untuk RUPO tersebut akan dimuat dalam 1 (satu) Surat Kabar Harian Berperedaran Nasional pada hari **Jumat, tanggal 18 Maret 2022**.

Jakarta, 4 Maret 2022

EMITEN
JASAMARGA Indonesia Highway Corp.
PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk

WALI AMANAT
BANKMEGA
PT BANK MEGA Tbk